

**PERAN SUBAK DALAM PENGENDALIAN
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN
DI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh :

DANNY INDRA PERMANA
NIM. 12212641/P

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2016**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kebaruan Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penggunaan Tanah dan Perubahan Penggunaan Tanah.....	17
B. Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah	22
C. Subak Sebagai Instrumen Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah	24
D. Kerangka Pemikiran	32
E. Pertanyaan Penelitian.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	38

D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data	41
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH	
A. Letak Geografis.....	45
B. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	49
C. Kondisi Pertanahan	51
D. Kondisi Subak.....	53
BAB V. KARAKTERISTIK PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KECAMATAN KEDIRI TAHUN 2009-2015	
A. Penggunaan Tanah Kecamatan Kediri Tahun 2009	58
B. Penggunaan Tanah Kecamatan Kediri Tahun 2015	61
1. Koreksi Citra	61
2. Interpretasi Citra.....	64
3. Uji Lapang dan Reinterpretasi Citra	64
C. Perubahan Penggunaan Tanah Kecamatan Kediri Tahun 2009-2015	69
1. Jenis dan Luas Perubahan	69
2. Sebaran Perubahan	73
3. Pola Perubahan.....	76
BAB VI. PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH OLEH SUBAK	
A. Subak Sebagai Lembaga Sosial	79
B. Subak Sebagai Organisasi Petani.....	90
C. Subak Sebagai Sistem Sosial	98
BAB VII. PENUTUP	
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**THE ROLE OF SUBAK IN CONTROLLING
CHANGE THE USE OF AGRICULTURAL LAND INTO
NON-AGRICULTURAL IN SUB-DISTRICT OF KEDIRI
DISTRICT OF TABANAN**

By : Danny Indra Permana

ABSTRACT

Subak as a traditional organization in the field of water control in Bali has a role in controlling the change of land use. The purposes of this research are to know the characteristics of change of land use (type, area, distribution and pattern) that occurs and the role of Subak in controlling change the use of agricultural land into non-agriculture in the sub-district of Kediri district of Tabanan.

This research was conducted in the sub-district of Kediri district of Tabanan. The method used was the descriptive method with the qualitative approach. Data were collected through interviews, document studies and field observations. The analysis technique used was the technique of overlaying to determine the type and wide area of changes in land use, nearest neighbor analysis (Continuum Nearest Neighbor) to determine the distribution of land use changes, and qualitative analysis technique to determine the role of Subak in controlling the change of use of agricultural land into non-agricultural.

The results of research showed that the amount of area which changes in the use of agricultural land into non-agricultural in sub-district of Kediri in 2009 up to 2015 was 248.43 Ha or 4.63% of total area of the sub-district of Kediri. Many agricultural lands changed into settlements (villages and housing), ground services, warehousing and industry. The pattern of land use change was linear following the pattern of the road network. The role of Subak as a social institution in controlling the change of land use can be seen in the form of awig-awig or perarem. The role of Subak as a farmer organization was its involvement in the arrangement of spatial planning and the permission from the Subak (pekaseh) if there are those who will change the use of agricultural land into non-agricultural. The role of Subak as a social system can be seen in form of utilization of natural resources wisely and judiciously (the local wisdom).

Controlling of the change of land use which was based on community participation like Subak can be put forward. The results of this research can be used among others as a substance in the arrangement of the Balance Land Stewardship and as an input for the Government of Tabanan District in the making of policy in the field of regional planning and the permissions of the change of land use.

Keywords: *Subak, Change Of Land Use, Social Institution, The Farmer Organization, Social System*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tanah. Semakin lama jumlah penduduk terus bertambah, tidak terkecuali di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 237.641.326 jiwa dan tahun 2015 penduduk Indonesia mencapai 255.182.144 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mencapai kurang lebih 17.540.818 jiwa atau 7,38 % (BPS). Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang mengalami pertambahan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Bali tercatat sebanyak 3.907.400 jiwa dan pada tahun 2015 penduduk Bali tercatat 4.148.588 jiwa atau terjadi peningkatan sebesar 6,17% (BPS).

Menurut Robinson Tarigan (2006:185), jumlah penduduk adalah faktor utama untuk menentukan banyaknya permintaan bahan konsumsi yang perlu disediakan, begitu juga banyaknya fasilitas umum yang perlu dibangun di suatu wilayah. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Hadi Sabari Yunus (2008:219), bahwa bertambahnya jumlah penduduk akan selalu diikuti oleh tuntutan ruang untuk membangun tempat tinggal baik di dalam permukiman yang sudah berkembang maupun pada lahan-lahan pertanian/lahan kosong

lainnya. Pemenuhan kebutuhan pangan dan papan akan bertambah seiring dengan penambahan penduduk. Permasalahan akan muncul manakala terjadi ketidakseimbangan kepentingan antara pemenuhan kebutuhan pangan dan papan dengan ketersediaan tanah yang terbatas. Kebutuhan pangan memerlukan tanah pertanian yang luas dan untuk kebutuhan papan juga dibutuhkan tanah yang tidak sedikit.

Salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang mengalami kenaikan jumlah penduduk adalah Kabupaten Tabanan. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Tabanan cukup pesat. Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Tabanan sebanyak 420.913 jiwa. Jumlah tersebut pada tahun 2015 meningkat menjadi 435.900 jiwa atau 3,56% (Bali Dalam Angka, 2015:103). Pertambahan jumlah penduduk ini akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pangan dan papan di Kabupaten Tabanan. Pemenuhan kebutuhan pangan ini harus diimbangi dengan ketersediaan tanah pertanian untuk menghasilkan tanaman pangan. Begitu juga untuk memenuhi kebutuhan papan akan memerlukan tanah yang cukup untuk membangun pemukiman dan fasilitas umum lainnya. Hal ini membawa dampak terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan papan.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, bahwa pada tahun 2009 total tanah pertanian di Bali tercatat 81.931 Ha sedangkan pada tahun 2012 total tanah pertanian tercatat 81.625 Ha. Hal ini berarti dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dari 2009 sampai dengan tahun

2012 tercatat perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian sebesar 306 Ha atau sekitar 76.5 Ha/tahun.

Kabupaten Tabanan sebagai penghasil beras terbesar bagi Provinsi Bali saat ini mempunyai tanah pertanian yang semakin berkurang luasnya. Tanah pertanian yang dulunya merupakan kebanggaan masyarakat Tabanan kini berubah fungsi menjadi perumahan dan pertokoan. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan bagi masa depan petani dan organisasi tradisional yang bergerak di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani yang terkenal di Bali yaitu subak.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri merupakan salah satu kecamatan yang banyak mengalami penurunan jumlah luas tanah pertanian (sawah) dari tahun 2009 sampai tahun 2015 setelah Kecamatan Kerambitan. Jumlah tanah pertanian (sawah) sampai tahun 2015 di Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Tanah Pertanian Tiap Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2009-2014

No	Kecamatan	Luas Tanah Pertanian (Ha)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Selemadeg Barat	1.161	1.161	1.161	1.161	1.103	1103
2	Selemadeg	1.895	1.895	1.895	1.907	1.907	1.883
3	Selemadeg Timur	2.342	2.342	2.342	2.320	2.313	2.300
4	Kerambitan	2.516	2.516	2.516	2.516	2.409	2.397
5	Tabanan	1.993	1.990	1.990	1.990	1.982	1.975
6	Kediri	3.036	3.029	3.029	3.006	2.982	2.950
7	Marga	2.326	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
8	Baturiti	1.886	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808
9	Penebel	4.363	4.363	4.363	4.362	4.362	4.362
10	Pupuan	1.031	1.031	1.011	998	998	998
Total		22.465	22.455	22.435	22.388	22.184	21.962

Sumber: Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Tabanan

Berdasarkan Tabel 1, sampai dengan tahun 2014 luas sawah yang ada di Kecamatan Kediri adalah 2.950 Ha, padahal dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 pemerintah mengalokasikan tanah seluas kurang lebih 2.935 Ha dari luas total Kecamatan Kediri 5.360 Ha sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Melihat perkembangan wilayah yang ada, maka ketersediaan tanah pertanian semakin sempit sehingga diperlukan pengendalian perubahan penggunaan tanah untuk tetap menjaga keberadaan tanah pertanian. Menurut Sutaryono (2007:64), dualisme terjadi ketika di satu sisi perkembangan wilayah adalah sebuah keharusan dan di sisi lain pengendalian perubahan penggunaan tanah juga mutlak diperlukan, mengingat sumberdaya tanah sangat terbatas.

Kecamatan Kediri mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang perekonomian di Kabupaten Tabanan. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012. Kecamatan Kediri ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi. Penetapan tersebut didukung oleh letak Kecamatan Kediri yang berada di pinggiran kota Tabanan. Letak Kecamatan Kediri sebagai wilayah yang sangat strategis untuk kepentingan ekonomi menyebabkan wilayahnya menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bertempat tinggal dan mengembangkan usaha di daerah tersebut. Di samping sebagai kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi, Kecamatan Kediri juga ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berupa kawasan lahan basah. Oleh karena itu, pembangunan di Kecamatan Kediri tetap harus memperhatikan fungsi kawasan pertanian.

Perkembangan sektor pariwisata juga membawa dampak pada berkurangnya tanah pertanian yang ada di Kecamatan Kediri. Kecamatan Kediri dalam RTRW Kabupaten Tabanan periode tahun 2012-2032 ditetapkan menjadi Kawasan Peruntukan Pariwisata. Penetapan sebagai Kawasan Peruntukan Pariwisata mengakibatkan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang fungsi dari kawasan tersebut. Hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi investor baik dari dalam ataupun luar negeri banyak mencari lahan produktif dan letaknya strategis yang ada di desa-desa tersebut untuk dibangun guna menunjang sektor pariwisata. Beberapa desa yang ada di Kecamatan Kediri masuk dalam Kawasan Peruntukan Pariwisata, seperti Desa Beraban, Desa Belalang, Desa Pangkung Tibah, Desa Pandak Gede, dan Desa Bengkel.

Beberapa hasil penelitian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian mengungkapkan bahwa salah satu hal yang patut diwaspadai dari fenomena alih fungsi lahan adalah sifatnya yang sporadis dan berdimensi individu untuk berbagai keperluan seperti perumahan dan fasilitas lainnya (Sumaryanto et al., 2002). Oleh karena itu, pendekatan yang dianggap paling tepat untuk menanganinya adalah dengan melibatkan masyarakat melalui inisiatif dan aksi kolektif (Direktorat Pangan dan Pertanian, 2006). Peran serta masyarakat dalam pengendalian perubahan penggunaan tanah memang sangat diperlukan, mengingat masyarakat adalah pihak yang paling mengerti tentang karakteristik wilayahnya serta paling berkepentingan terhadap

wilayahnya tersebut. (http://manajemenpertanahan.blogspot.co.id/2013/10/ppl-berbasis-komunitas_16.html?m=1)

Subak merupakan organisasi masyarakat yang ada di Provinsi Bali. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, yang dimaksud Subak adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Salah satu fungsi subak sebagai organisasi tradisional adalah menjaga kelestarian wilayah subak dan lingkungannya dalam rangka pertanian berkelanjutan, sehingga subak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ruang wilayahnya masing-masing dari maraknya perubahan penggunaan tanah.

Perubahan penggunaan tanah yang begitu besar terjadi di Kecamatan Kediri, oleh Karena itu penting untuk mengetahui karakteristik perubahan penggunaan tanah di Kecamatan Kediri, baik dilihat dari jenis, luas dan sebarannya serta kecenderungan pola perubahan penggunaan dan peran subak dalam pengendalian perubahan penggunaan tanah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Subak Dalam Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan”

B. Perumusan Masalah

Perubahan penggunaan tanah yang terjadi di Kecamatan Kediri tidak dapat diketahui secara pasti baik jenis, luas maupun persebarannya. Informasi mengenai perubahan penggunaan tanah yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan hanya diperoleh dari laporan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT). Padahal data tersebut belum menggambarkan kenyataan perubahan tanah pertanian menjadi non pertanian yang terjadi di lapangan. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya banyak pihak yang tidak mengajukan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka IPPT tetapi justru telah mengubah tanah pertaniannya di lapangan, sebaliknya ada yang mengajukan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka IPPT tetapi belum melaksanakannya di lapangan.

Penetapan Kecamatan Kediri sebagai kawasan pertanian tanaman pangan didukung oleh keberadaan subak sebagai organisasi masyarakat tradisional di Bali yang bergerak dalam pengelolaan air untuk produksi tanaman padi. Pada kenyataannya, saat ini banyak tanah pertanian di wilayah subak yang mengalami perubahan penggunaan menjadi non pertanian.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui karakteristik perubahan penggunaan tanah yang terjadi di wilayah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.
2. Menemukenali subak dalam pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat di bidang pertanahan, penelitian ini dapat digunakan sebagai data untuk melakukan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah serta dalam penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah.
2. Manfaat di bidang perencanaan wilayah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang perencanaan wilayah Kabupaten Tabanan.

E. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Kebaruan penelitian merupakan bagian penting dalam suatu penelitian. Menurut Yunus (2010:29) terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan pertimbangan etika akademis, maka peneliti harus dapat mengungkapkan kebaruan penelitian yang dilakukannya. Peneliti harus dapat menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan misalnya dalam hal waktu penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian sehingga dapat dihindari plagiasi karya orang lain. Penelitian mengenai perubahan penggunaan tanah bukan merupakan hal baru, telah banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema skripsi ini, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kebaruan Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Ahmad Nurasa, Skripsi: 2008, STPN, Upaya Mencegah Alih Fungsi Tanah Sawah menjadi Non Sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean dan Kecamatan Moyudan 2. Mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi untuk mencegah alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah di Kabupaten Sleman 	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk mengendalikan alih fungsi tanah sawah yaitu melalui instrument kebijakan yang memerlukan pendekatan holistik 2. Koordinasi antar instansi dibawah pimpinan Bupati yang bernaung dalam suatu wadah atau <i>Team Work</i> dalam hal-hal tertentu sudah berjalan dengan cukup baik.
2.	Ari Fitrianto, Tesis:2012, Institut Teknologi Surabaya, Kajian Perubahan Penggunaan Lahan Akibat Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi wilayah yang mengalami perubahan lahan pertanian ke non pertanian di sepanjang jalan lingkar selatan. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lahan pertanian di sepanjang jalan lingkar 3. Merumuskan tipologi perubahan lahan pertanian di kawasan jalan lingkar selatan 4. Merumuskan rekomendasi penanganan perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian sesuai tipologi perubahannya 	Metode Kombinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan panjang jalan lingkar selatan mempengaruhi perubahan lahan pertanian ke non pertanian sebesar 89,7% dan mengakibatkan terjadinya perubahan lahan pertanian ke non pertanian pada wilayah Kelurahan Cebongan sebesar 0,089 ha, Kelurahan Randuacir 0,011 ha, Kelurahan Kumpulrejo 0,015 ha, Kelurahan Dukuh 0,076 ha, Kelurahan Kecandran 0,113 ha, Kelurahan Pulutan 0,006 ha dan kelurahan Blotongan sebesar 0,195 ha dengan total keseluruhan perubahan lahan sebesar 0,077 ha. 2. Faktor yang sangat kuat mempengaruhi perubahan lahan pertanian dikawasan jalan lingkar selatan berdasarkan analisis regresi yaitu faktor tingkat urbanisasi.

Bersambung...

				3. Tipologi perubahan lahan pertanian dikawasan jalan lingkar selatan berdasarkan analisis cluster terbagi menjadi 2 cluster, pada cluster 1 dipengaruhi faktor tingkat urbanisasi, Cluster 2 dipengaruhi faktor tingkat pelayanan utilitas
3.	Yohanes Rustanto, Tesis: 2013, Universitas Gadjah Mada, Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian (2005-2009) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi seberapa besar perubahan penggunaan tanah di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman antara tahun 2005-2009 2. Mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kecamatan Depok antara tahun 2005-2009 	Metode Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara bersama-sama faktor harga tanah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan jarak mempunyai pengaruh terhadap perubahan penggunaan tanah sebesar 45,1% yang tidak diteliti dalam penelitian ini 2. Faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perubahan penggunaan tanah adalah kepadatan penduduk, yang terjadi karena permintaan pasar untuk kebutuhan perumahan maupun untuk pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya seperti rumah makan, sekolah, kampus, rumah sakit dan lain-lain
4.	Tati Atmayanti, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2014, Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian ke Non Pertanian dan Faktor-Faktor Yang mempengaruhinya di Kota Mataram 2007-2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis pengaruh faktor-faktor penyebab perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian di kota mataram, 2007-2012 2. Menganalisis pola perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian di Kota Mataram, 2007-2012 3. Menganalisis dampak dari pola perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian di kota Mataram terhadap harga lahan. 	Kuantitatif deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara keseluruhan jumlah penduduk, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan Jumlah perusahaan mempengaruhi luas lahan pertanian yang terkonversi di Kota Mataram. 2. Pola perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian lebih mengarah pada pusat pengembangan kegiatan ekonomi (CBD) 3. Dampak dari pola perubahan penggunaan lahan yang mengarah ke CBD dan pembangunan fisik

Bersambung...

				infrastruktur kota baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, mengakibatkan peningkatan harga lahan disekitar kawasan tersebut
5.	Nano Juliandi, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2014. Perubahan penggunaan lahan pertanian ke Non Pertanian di Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2000-2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Jenis dan Luas perubahan lahan pertanian ke non pertanian. 2. Mengetahui trend perkembangan perubahan penggunaan lahan pertanian di daerah penelitian 3. Mengkaji perubahan penggunaan lahan pertanian dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah 	Deskriptif-Eksplanasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian tahun 2000-2011 di Kecamatan Mungkid lebih luas dibandingkan Kecamatan Dukun, jenis perubahan lahan yang terjadi di Kecamatan Mungkid juga lebih bervariasi dibandingkan Kecamatan Dukun. 2. Trend perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Mungkid berada pada 3 ruas jalan utama berupa industry, pertokoan dan pabrik, sedangkan di Kecamatan Dukun trend perubahan lahan yang terjadi paling banyak berupa permukiman atau rumah. 3. Keberadaan Perda RRW kabupaten Magelang sangat dipatuhi oleh masyarakat sehingga rencana tersebut tercapai dengan baik. Kecamatan Mungkid diprioritaskan untuk pusat pertanian dan pariwisata, sedangkan Kecamatan Dukun diprioritaskan menjadi pusat perdagangan hasil tani.
6.	Made Dewi Antari, Tesis, Universitas Udayana, 2014, Marginalisasi Petani di Subak Saba Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui bentuk marginalisasi petani di Subak Saba Kecamatan Denpasar Timur 2. Memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya marginalisasi petani di Subak Saba 	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marginalisasi petani Subak Saba menyangkut keterpinggiran ekonomi (modal), ketidakberdayaan petani dan keterdesakan dalam mempertahankan lahan sawah akibat masuknya dunia kapitalis.

Bersambung...

		<p>Kecamatan Denpasar Timur</p> <p>3. Mengetahui dampak dan makna marginalisasi petani di Subak Saba Kecamatan Denpasar Timur</p>		<p>2. Faktor yang mengakibatkan petani Subak Saba mengalami marginalisasi yaitu peran negara(penguasa) dan keterlibatan investor, globalisasi dalam bentuk kapitalisme, rendahnya tingkat pendidikan.</p> <p>3. Implikasi dari marginalisasi yang terjadi yaitu adanya kemiskinan yang dirasakan oleh petani di Subak Saba, terjadi pergeseran nilai sosial budaya yang berpengaruh pada etos kerja petani, terjadi degradasi lingkungan fisik akibat adanya alih fungsi lahan.</p>
7.	<p>I Made Mahadi Dwipradnyana, Tesis:Universitas Udayana,2014, Faktor-faktor yang mempengaruhi Konversi Lahan Pertanian Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Subak Jadi, Kecamatan Kediri,Tabanan)</p>	<p>1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan pertanian di Subak Jadi, Kecamatan Kediri Tabanan</p> <p>2. Untuk mengetahui dampak konversi lahan pertanian terhadap kesejahteraan petani di subak Jadi, Kecamatan Kediri Tabanan.</p>	Kuantitatif	<p>1. Faktor pendorong yang berpengaruh terhadap konversi lahan adalah mutu tanah, kebutuhan tempat tinggal dan kesempatan membeli lahan ditempat lain.</p> <p>2. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani subak jadi mengalami penurunan setelah adanya konversi lahan yaitu dari Rp. 19.707.568 menjadi Rp. 16.241.197</p>
8.	<p>Aang Firdaus, Skripsi:STPN,2015, Tendensi Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian Menggunakan Citra Satelit Multitemporal di Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Mengkaji kemampuan citra satelit Landsat untuk mengidentifikasi penggunaan lahan di Kabupaten</p> <p>2. Mengkaji dan mengetahui aspek pola, arah dan laju perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Bantul</p>	Kuantitatif dengan pendekatan keruangan	<p>1. Hasil interpretasi citra satelit Landsat tahun 2003 dan 2013 menggunakan metode klasifikasi multispectral dan dilakukan uji ketelitian didapat hasil ketelitian masing-masing 85,55% dan 85,11% yang menunjukkan hasil klasifikasi tersebut dapat digunakan sebagai data untuk keperluan analisis serta menunjukkan kondisi sebenarnya dilapangan</p> <p>2. Berdasarkan analisis tendensi</p>

Bersambung...

				perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Bantul, menunjukkan arah perubahan penggunaan lahan diperkirakan terjadi pada Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan
9.	Octaverra Bagus Oka Satrya Anggara, Skripsi: Universitas Gadjah Mada, 2015, Eksistensi Subak Di Tengah Laju Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Badung dan Gianyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui adanya korelasi antara persepsi anggota subak dengan keaktifan mengikuti penyuluhan, luas lahan pertanian dengan keaktifan mengikuti penyuluhan 2. Mengetahui tingkat penerapan awig-awig subak di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung 3. Mengetahui tingkat eksistensi subak di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung 	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat korelasi yang sedang antara persepsi anggota subak dengan keaktifan penyuluhan di Kabupaten Badung sedangkan di Kabupaten Gianyar korelasi antara persepsi anggota subak dengan keaktifan mengikuti penyuluhan rendah. 2. Tidak terdapat perbedaan antara penerapan awig-awig subak di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar 3. Semakin cepatnya laju alih fungsi lahan di Kabupaten Badung dan Gianyar menggambarkan eksistensi subak akan dipertaruhkan, sehingga jika terjadi lebih masif maka berpotensi terjadinya kehilangan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai sosial ekonomi dan lingkungan yang sangat tinggi.

Bersambung...

10.	<p>Danny Indra Permana, Skripsi: STPN, 2016, Peran Subak Dalam Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui karakteristik perubahan penggunaan tanah yang terjadi di wilayah Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. 2. Menemukenali subak dalam pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. 	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Kediri seluas 248.43 Ha. Sebaran perubahannya mengelompok (<i>clustered</i>) dan pola perubahannya cenderung linier mengikuti jaringan jalan. 2. Peran subak dalam pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian dilihat dari subak sebagai lembaga sosial yaitu dibuatnya <i>awig-awig</i> dan <i>perarem</i> subak. Dilihat dari subak sebagai organisasi petani yaitu keterlibatan subak dalam penyusunan RTRW dan diperlukannya ijin dari subak (<i>pekaseh</i>) apabila ada pihak yang akan merubah penggunaan tanah pertanian. Peran subak dilihat dari subak sebagai sebuah sistem sosial yaitu pengelolaan sumberdaya alam secara arif dan bijaksana.
-----	--	---	----------------------------------	---

Sumber: Berbagai Skripsi dan Tesis

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik perubahan penggunaan tanah (jenis, luas, sebaran dan pola) yang terjadi serta peran subak dalam pengendalian perubahan penggunaan tanah di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.

Penelitian-penelitian sebelumnya dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian dan dampak perubahan penggunaan tanah tersebut seperti yang dilakukan oleh Yohanes Rustanto (2013), Tati Atmayanti (2014) dan I Made Mahadi Dwipradnyana (2014). Selain tujuan tersebut, hal-hal lain yang diteliti yaitu tentang pola perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian (Tati Atmayanti:2014), jenis dan luas perubahan penggunaan tanah yang terjadi di Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Dukun (Nano Juliandi:2014) serta pola, arah dan laju perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Bantul (Aang Firdaus:2015).

Ada pula penelitian yang juga meneliti tentang upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah dan mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi untuk mencegah alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah di Kabupaten Sleman seperti yang dilakukan oleh Ahmad Nurasa (2008). Penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Octaverra Bagus Oka Satrya Anggara (2015) bertujuan untuk mengetahui eksistensi subak di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berbeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Lokasi dengan karakteristik wilayah yang berbeda diharapkan memberikan pengaruh yang berbeda pada hasil penelitian yang dilakukan ini apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang terjadi di Kecamatan Kediri dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 seluas 248,43 Ha. Tanah pertanian banyak berubah menjadi permukiman (kampung dan perumahan), tanah jasa dan industri. Perubahan penggunaan tanah tersebar di seluruh desa di Kecamatan Kediri dengan tipe sebaran mengelompok (*clustered*) dan pola perubahan penggunaan tanahnya bersifat linier yaitu mengikuti pola jaringan jalan.
2. Peran subak sebagai lembaga sosial dalam pengendalian perubahan penggunaan tanah di Kecamatan Kediri yaitu dengan dibuatnya *awig-awig* dan *perarem* subak mengenai larangan pembangunan dan pengenaan dana bagi pihak-pihak yang melakukan pembangunan di wilayah subak serta dibuatnya papan pelarangan pembangunan di wilayah subak. Sebagai organisasi petani, subak dilibatkan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan diperlukannya ijin dari subak (*pekaseh*) apabila ada pihak yang akan melakukan perubahan penggunaan tanah di wilayah subak. Sebagai sistem sosial peran subak dalam pengendalian perubahan penggunaan tanah yaitu pengelolaan sumberdaya alam secara arif dan bijaksana.

B. Saran

1. Melihat perkembangan wilayah Kecamatan Kediri saat ini yang begitu cepat, maka dalam rangka perlindungan terhadap tanah pertanian produktif sangat diperlukan peraturan daerah yang dapat melindungi tanah pertanian produktif seperti mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Perlunya sosialisasi kepada subak untuk membuat *awig-awig* atau *perarem* dalam rangka melindungi wilayah pertanian, hal ini diperlukan karena tidak semua subak memiliki *awig-awig* atau *perarem* yang mengatur hal tersebut.
3. Perlu dikembangkannya kegiatan pariwisata berbasis lingkungan seperti misalnya ekowisata subak di wilayah Kecamatan Kediri sebagai alternatif untuk kegiatan pariwisata tanpa merusak kelestarian tanah pertanian ditengah maraknya perubahan penggunaan tanah serta untuk menjaga subak agar tetap terjaga eksistensinya.
4. Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebaiknya diperlukan tambahan rekomendasi atau surat ijin dari subak (*pekaseh*) apabila ada pihak yang akan merubah penggunaan tanah pertanian di wilayah subak. Hal ini mengingat pengendalian perubahan penggunaan tanah merupakan upaya menyeluruh yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arminah, Valentina. (1997). Integrasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Untuk Kajian Perkembangan Fisik Kota Surakarta. *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Atmayanti, Tati. (2014). Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Ke Non Pertanian dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kota Mataram 2007-2012. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bintarto, R dan Hadisumarno, S (1987). *Metode Analisa Geografi*. LP3ES, Jakarta.
- Creswell, J.W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Danoedoro, Projo. (2012). *Pengantar Penginderaan Jauh Digital*. Andi, Yogyakarta.
- Dewi, Rosianita. (2011). Kajian Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Madiun. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Direktorat Pangan dan Pertanian. (2006). *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Jakarta. BAPPENAS
- Fitrianto, Ari. (2012). Perubahan Penggunaan Lahan Akibat Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga. *Tesis*. Surabaya
- Firdaus, Aang. (2015). Tendensi Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian Menggunakan Citra Satelit Multitemporal di Kabupaten Bantul. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- General Accounting Office. (1983). *Irrigation Assistance to Developing Countries Should Require Stronger Commitments to Operation and Maintenance*. Gaithersburg, Md. General Accounting Office.
- Indradi, dkk. (2008). *Modul Penatagunaan Tanah*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Isa, Iwan. (2006). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Prosiding seminar*. Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Jayadinata, T. Johara. (1999). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah*. Institut Teknologi Bandung, Bandung.

- Juliandi, Nano. (2014). Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2000-2011. *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mahadi, Dwipradnyana I Made. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Pertanian Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Subak Jadi Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan). *Tesis*. Universitas Udayana, Denpasar.
- Mieke Komar Kantaatmadja. (1994). *Hukum Angkasa dan Tata Ruang*. Mandar Maju. Bandung.
- Nurasa, Ahmad.(2008). Upaya Mencegah Alih Fungsi Tanah Swah Menjadi Non Sawah di Kecamatan Godean dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Puspasari, Anneke. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani. *Laporan Penelitian*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Rustanto, Yohanes. (2013). Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian (2005-2009) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Ruswanto, 2009, Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X, Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional
- Satrya, Oktaverra B.O. (2015). Eksistensi Subak Di Tengah Laju Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Badung dan Gianyar. *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suarjaya, Wayan. (2009). *Teori Organisasi*. Paramita. Surabaya.
- Sudaryanto. et.al. (2014). Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Untuk Penyusunan Neraca Penggunaan Lahan Berdasarkan Pedoman Baku Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. *Jurnal Magistra*. Universitas Widya Dharma. Klaten.
- Sumaryanto, Tahlim S. (2005). Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah Sebagai Landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya. *Prosiding seminar* penanganan konversi lahan dan pencapaian pertanian abadi.Satyawan Et al. Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM Institut Pertanian Bogor: Bogor

- Sumaryanto, dkk. (2002). Masalah Pertanahan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Tindak Lanjut Pembaruan Agraria. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 20, Nomor.2, Desember 2002*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian: Bogor
- Sutaryono, (2007). *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*. Tugu Jogja. Grafika, Yogyakarta
- Sutawan I Nyoman. (2008). *Organisasi dan Manajemen Subak di Bali*. Pustaka Bali Post: Denpasar.
- Tarigan, R. (2006). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- UNESCO. (2011). *Cultural Landscape Of Bali Province*. Division Of Cultural Heritage UNESCO.
- Wardi, I Nyoman dkk. (2014). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan dan Budaya Subak : Studi Kasus Di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. *Jurnal Bumi Lestari Volume 14 No. 2*. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Udayana. Denpasar.
- Winoto J. (2005). Kebijakan Pengendalian Alih fungsi Tanah Pertanian Dan Implementasinya. *Prosiding seminar, Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian pertanian abadi*. Satyawan et al. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM-Institut Pertanian Bogor.
- Windia, Wayan dkk. (2015). *Sistem Subak Di Bali (Kajian Sosiologis)*. Udayana University Press: Denpasar
- Yunus, H.S. (2005). *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- _____ (2008). *Manajemen Kota Perspektif Spasial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- _____ (2008). *Dinamika Wilayah Peri Urban Dinamika Masa Depan Kota*. Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- _____ (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Pemetaan Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032

Peraturan Bupati Tabanan Nommor 74 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pengkaplingan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Di Kabupaten Tabanan.

WEBSITE

<http://distantp.baliprov.go.id/lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan/>

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/ART5-2c.pdf>

http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=dynamic_reg

<http://distanprovinsibali.com/lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan>

http://manajemenpertanahan.blogspot.co.id/2013/10/ppl-berbasis-komunitas_16.html?m=1